

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT SABHARA



**RENCANA KERJA
DIREKTORAT SABHARA POLDA KEPRI
T.A. 2018**



**KEPUTUSAN DIREKTUR SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU
NOMOR : KEP / / XI / 2017 TANGGAL NOVEMBER 2017**



KEPUTUSAN DIREKTUR SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU
Nomor : Kep / / XI /2017/ Ditsabhara

tentang

RENCANA KERJA DIREKTORAT SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Sabhara Kepulauan Riau T.A. 2018 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (SISRENSTRA POLRI);
 8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKEP/572/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri;
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda);
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek);
 11. Keputusan

11. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/370/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/260/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/631/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;

2. Pagu Indikatif Direktorat Sabhara Polda Kepri Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU T.A. 2018.**

1. Rencana Kerja Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau T.A. 2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, berlaku untuk di Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau dan sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Polda Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/204/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
pada tanggal: November 2017

DIREKTUR SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU

Tembusan :
1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Karorena Polda Kepri

Drs. ANZARI MALATUA SINAGA, MM
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62090826

**RENCANA KERJA DIREKTORAT SABHARA
POLDA KEPULAUAN RIAU T.A. 2018**

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Tahapan Rencana Strategis Polda Kepri 2015-2019 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Ditsabhara Polda Kepri T.A. 2017 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Ditsabhara Polda Kepri T.A. 2018. Rencana Kerja Ditsabhara Polda Kepri T.A. 2018 ini merupakan penjabaran dari revisi kedua Rencana Strategis Polda Kepri 2015-2019 dan Rencana Kerja Polda Kepri Tahun 2018 dengan pentahapan kebijakan mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan Personel Polda Kepri guna menghadapi berbagai tantangan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018 memperhatikan arah dan kebijakan Polda Kepri melalui program optimalisasi aksi menuju Polda Kepri yang semakin professional modern dan terpercaya dengan visi terwujudnya Polda Kepri yang makin professional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Ditsabhara Polda Kepri merupakan bagian dari Polda Kepri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di wilayah Provinsi Kepri. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun anggaran 2018 akan memperhatikan arah dan kebijakan Polda Kepri yang sudah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah khususnya dibidang keamanan serta melaksanakan program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin *professional, modern* dan terpercaya yang disinergikan dengan visi dan misi Polda Kepri.

Pelaksanaan tugas Ditsabhara Polda Kepri cukup membanggakan dengan ditandai kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh segenap personel Ditsabhara Polda Kepri yang didukung oleh pihak-pihak terkait baik unsur Pemerintah, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Polda Kepri. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat serta Pemerintah yang lebih baik.

Tahun

Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditsabhara Polda Kepri 2015-2019 dengan titik sentral pada upaya peningkatan *profesionalisme* personel Ditsabhara Polda Kepri serta membangun sinergi dengan seluruh instansi terkait dan komponen masyarakat yang ada di Provinsi Kepri dalam upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta meningkatnya penilaian positif dari masyarakat terkait dengan pelayanan Kepolisian. Strategi pencapaian sasaran akan mengacu pada hal-hal yang telah dicapai pada Tahun sebelumnya baik dibidang operasional, pembinaan kekuatan maupun pembangunan kekuatan. Keberhasilan Ditsabhara Polda Kepri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan daerah sebagai prasyarat terlaksananya pembangunan daerah Kepulauan Riau.

Tugas Ditsabhara Polda Kepri kedepan masih dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat di penuhi. Masyarakat menuntut dan mengharapkan agar Polri mampu mewujudkan : (1) postur yang professional, mandiri, bersih dan bebas dari KKN; (2); tergelarnya Polri di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tenteram; (3) memberikan pelayanan prima Kepolisian dengan cepat, tidak mempersulit dan tuntas dalam menyelesaikan masalah; (4) penampilan yang simpatik, humanis tapi tegas dan bermoral serta modern; (5) Polri yang transparan dan akuntabel dalam setiap tindakannya; (6) mampu mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas; (7) penegakan hukum yang professional, proporsional, tegas, jujur dan adil (tidak diskriminatif dan memenuhi rasa keadilan) terutama terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat yang didukung dengan terjaminnya transparansi proses penyidikan perkara.

Lingkungan strategis baik global, regional, nasional dan lokal sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Ditsabhara Polda Kepri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah-olah telah menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya daerah yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku negatif seperti: *materialistis, konsumtif dan hedonistis*.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan *intoleransi*, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, *cyber crime*, penyelundupan manusia, narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham *radikalisme* serta *terorisme*.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan perkiraan Intelijen tahun 2018 merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja Ditsabhara Polda Kepulauan Riau T.A. 2018, meliputi perkembangan lingkungan strategis baik Global, Regional, Nasional dan daerah maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan (Ipoleksosbud dan Kam).

a. **Perkembangan Aspek kehidupan**

1) **Global**

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

- a) upaya pemerintah Indonesia menghadapi transformasi global yang tertuang dalam SDG (*Sustainable Development Goals*) 2016-2030 sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*) 2000-2015 merupakan upaya pemerintah Indonesia merespons perkembangan dunia internasional yang sejalan dengan dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan konsep Nasional (Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019). Agenda global tersebut harus mengedepankan kepentingan nasional sesuai kemampuan

bangsa, khususnya di level daerah. Dalam artian tidak perlu mengikuti semuanya, namun cukup memilih dan berfokus pada hal-hal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- b) Indonesia melakukan ratifikasi atas *Paris Agreement* merupakan kebijakan Indonesia dalam merespons kebijakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2016-2030 yang diprakarsai PBB demi mewujudkan salah satu pointnya untuk membangun berbasaskan lingkungan dan perubahan iklim. *Paris Agreement* yang ditetapkan di COP-21, bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius pada akhir abad ini dengan menurunkan emisi global menjadi 40 giga ton pada 2030
Oleh Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC pada saat itu, kesepakatan ini dinilai sebagai modal kontrak sosial dunia baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global;
- c) Bank dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 di negara berkembang Asia Timur termasuk Indonesia dan Pasifik akan tetap bertahan. Meskipun demikian, kawasan ini dinilai masih menghadapi berbagai risiko besar untuk tumbuh. Oleh sebab itu, Bank Dunia menyatakan sejumlah negara perlu mengambil langkah guna mengurangi kerentanan finansial dan fiskal;
- d) Bank Dunia memperkirakan Tiongkok akan terus melakukan transisi ke pertumbuhan yang lebih lambat namun berkelanjutan. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan mencapai 6,7 persen pada 2016, 6,5 persen di 2017, dan 6,3 persen di 2018. Di Tiongkok, pertumbuhan akan melemah sejalan dengan perekonomiannya yang terus menuju sektor konsumsi, jasa, dan aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi dan kelebihan kapasitas industri dikurangi. Namun, pasar tenaga kerja yang lebih ketat akan terus mendukung pertumbuhan pendapatan dan konsumsi rumah tangga.

- e) warga dunia yang tidak lagi mempersoalkan kebangsaan, kecenderungan untuk bekerja di negara lain, bermigrasi, bahkan pindah kewarganegaraan lain semakin menguat di berbagai bangsa, terutama di kalangan muda. Perhatian generasi muda dalam masa lima tahun mendatang dan seterusnya terhadap aspek global akan semakin menguat, melampaui batasan kebangsaannya masing-masing.
- f) kampanye yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengajukan diri menjadi anggota DK PBB merupakan usaha bagi bangsa Indonesia dimana Indonesia dinilai bisa lebih berperan untuk mereformasi PBB agar multilateralisme berlaku efektif.

2) Regional

a) Indonesia dengan Cina

Ketegangan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Cina terkait batas perairan di wilayah Natuna, Laut Tiongkok. Hal tersebut bermula adanya dugaan pelanggaran kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia dan kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sempat menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau namun Negara Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan kapal nelayan dari negaranya menangkap ikan di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi.

b) Indonesia dengan Malaysia

(1) Permasalahan batas wilayah di selat Malaka yaitu Pada tahun 1969 Malaysia mengumumkan bahwa lebar wilayah perairannya menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar seseuai ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958. Namun sebelumnya Indonesia telah lebih dulu menetapkan batas-batas wilayahnya sejauh 12 mil laut dari garis dasar termasuk Selat Malaka. Hal ini menyebabkan perseteruan antara dua negara mengenai batas laut wilayah mereka di Selat Malaka yang kurang dari 24 mil laut.

(2) Wilayah

(2) Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda Van Doorn tahun 1906. Malaysia pun tak memperlmasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn tahun 1906 , peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935. Masalah baru timbul dalam MoU antara team Border Comeete Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.

c) Indonesia dengan Singapura

Permasalahan batas wilayah Di sebelah utara Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulauanya menjadi daratan yang luas.

3) Nasional

Lingkungan strategis Nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis Nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kepri, isu-isu strategis tersebut sebagai berikut :

a) Wilayah

- a) Wilayah Indonesia yang sangat luas terutama wilayah perairan/laut, apabila tidak dilakukan pengawasan ketat, merupakan kerawanan berbagai permasalahan kejahatan lintas batas antar negara dan keluar masuknya barang dan pelaku aktivitas ilegal di Perbatasan sebagai ancaman gangguan keamanan. Wilayah perairan selat Malaka, Natuna dan Sulu rawan perompakan laut;
- b) Indonesia salah satu negara memiliki jumlah penduduk sangat besar yaitu 257.912.349 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,2 %, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai masalah konflik sosial antar warga maupun masyarakat;
- c) Pelaksanaan Pilkada secara serentak Tahun 2018 yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 Provinsi, 30 Kota dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada;
- d) Peran elit dan politisi Parpol pada tahun 2018 akan meningkat serta cenderung atensi pada strategi menghadapi Pemilukada, Pemilu legislatif dan Pilpres, sehingga terjadinya pergeseran peta politik yang berpotensi terhadap kinerja pemerintah yang senantiasa akan berdampak terhadap penyelenggara negara maupun pejabat dalam pemerintahan sehingga berpotensi terjadinya reshuffle maupun tekanan terhadap pemerintah;
- e) Ancaman terorisme dan kelompok jaringan ISIS diwilayah Asia tenggara yang terjadi di Marawi Filipina akan berdampak pada stabilitas keamanan Nasional;
- f) Bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui mass media. Kondisi

tersebut

tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;

- g) Kebijakan Otonomi Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- h) Terbatasnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan telah berdampak terjadinya pelanggaran batas teritorial kelautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan perbatasan dan masih lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi meningkatnya gangguan terhadap sumber kekayaan laut dan habitatnya;
- i) Sengketa Pertanahan yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan. Disisi lain Penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertical;
- j) Permasalahan ketenagakerjaan masih diwarnai dengan tumbuh subur nya organisasi-organisasi buruh di Indonesia; maraknya tuntutan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh; hubungan bipartit dan tripartit yang tidak harmonis; persaingan memperoleh lapangan pekerjaan; dan maraknya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS illegal;
- k) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri;

- l) Pelaksanaan Ujian Nasional secara serentak di tingkat SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA yang perlu pengamanan dari Kepolisian.

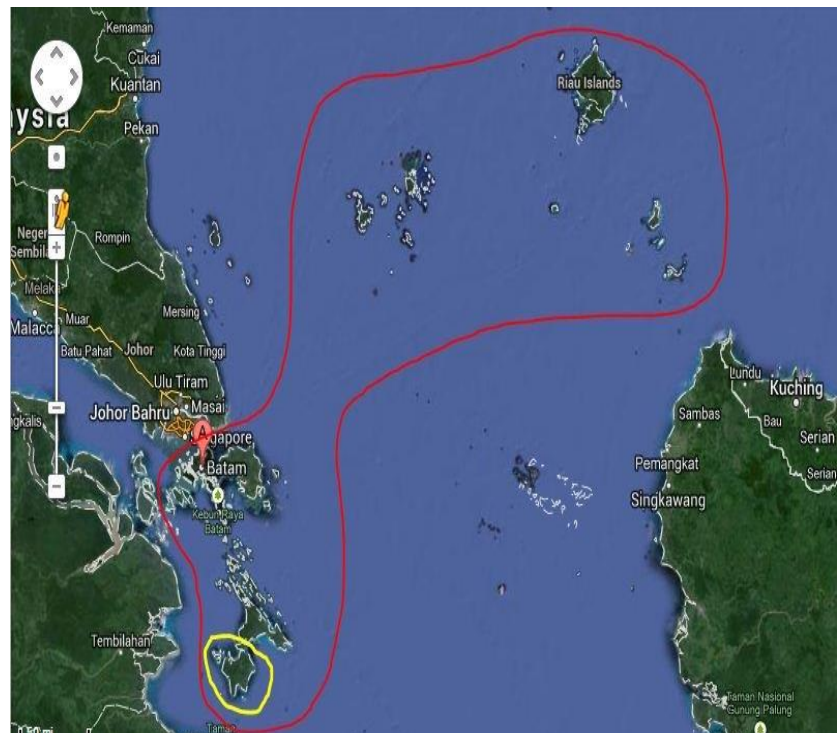
4) Daerah

Perkembangan kehidupan Propinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu Trigatra (Geografis, Demografi dan sumber daya alam) dan aspek Astagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan Keamanan) sebagai berikut :

a) Kondisi Geografis, Demografi dan sumber daya alam

(1) Geografis

Letak Geografis Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi tersebut juga mengandung kerawanan terhadap keamanan negara dalam bentuk sengketa perbatasan dan kejahatan lintas negara serta beberapa kejahatan lainnya.



(a) Wilayah

10 LAMPIRAN KEP DIRSABAHARA POLDA KEPRI
NOMOR :KEP / / XI / 2017 /DITSABHARA
TANGGAL : NOVEMBER 2017

- (a) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada :
- 5°,01° Lintang Utara s/d 0°,40°Lintang Selatan.
 - 103°,15° Bujur Timur s/d 109°,10° Bujur Timur.
- (b) Dengan Batas Wilayah antara lain :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Laut Cina Selatan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.
- (c) Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 251.810,71 Km² dengan luas wilayah daratan 10.595,41 Km² (4,21%), luas wilayah laut/Perairan 241.215,30 Km² (95,79%) yang meliputi 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari:
- belum bernama sebanyak 1.865 pulau;
 - bernama sebanyak 543 pulau;
 - berpenghuni sebanyak 366 pulau (15%);
 - tidak berpenghuni sebanyak 2.042 pulau (85%);
 - pulau terluar sebanyak 52 pulau;
 - pulau terdepan sebanyak 19 pulau.
- (d) Curah hujan di wilayah Provinsi Kepri 2000 mm/th dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 82-86 %, musim hujan terjadi pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau antara bulan April s/d Oktober, namun akibat pengaruh pemanasan global, sehingga mengalami pergeseran waktu yang tidak menentu;

(e) Provinsi.....

(e) Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tanggal berdirinya adalah 1 Juli 2004 dengan ibukotanya di Kota Tanjungpinang. Kepri terdiri dari 2 (dua) Kota dan 5 (lima) Kabupaten dengan perincian sebagai berikut :

- Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 3.990 Km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.060.309 jiwa. Letak Kota Batam yang sangat strategis, berhadapan langsung berhadapan langsung dengan Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ)
- Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan jumlah penduduk sekitar 210.836 jiwa, Kota Tanjungpinang sempat menjadi ibukota Provinsi Riau yang pertama, namun sejalan dengan perkembangannya sesuai dengan SK Mendagri No.5 tanggal 21 Juni 2001 Kota Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonomi;
- Kabupaten Bintan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 50 (lima puluh) wilayah Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 58.003,25 Km² dan jumlah penduduk sekitar 70.097 jiwa. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ), selain juga dikenal sebagai

12 LAMPIRAN KEP DIRSABAHARA POLDA KEPRI
NOMOR :KEP / / XI / 2017 /DITSABHARA
TANGGAL : NOVEMBER 2017

pusat pariwisata terpadu dan memiliki kawasan industri yang terus berkembang;

- Kabupaten Karimun dengan letak ibukotanya di Tanjungbalai Karimun, terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan dan 42 (empat puluh dua) Desa dengan luas wilayah sekitar 167.850 Km² dan jumlah penduduk sekitar 260.478 jiwa memiliki keunggulan tersendiri karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga merupakan salah satu basis pertumbuhan IMS – GT (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle) serta merupakan salah satu kawasan *Free Trade Zone* (FTZ);
- Kabupaten Lingga dengan ibukota Daek Lingga terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa/Kelurahan, luas wilayah sekitar 211.772 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 97.729 jiwa, daerah Kabupaten Lingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan pertanian;
- Kabupaten Natuna letak ibukotanya di Ranai terdiri dari 12 (duabelas) Kecamatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 141.901,2 Km² dan jumlah penduduk sekitar 76.606 jiwa, sedangkan luas lautan 97,72 Km², merupakan daerah yang kaya dengan minyak dan gas bumi;
- Kabupaten Anambas yang merupakan pemekaran dari Kab. Natuna letak ibukotanya di Tarempa terdiri dari 7 Kecamatan dengan jumlah penduduk 43.993 jiwa.

(2) Demografi

Jumlah Penduduk dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendataan dari BPS dan Dinas Kependudukan Tahun 2016 sebanyak **2.028.439** jiwa dengan perincian sebagai berikut :

| No | Kabupaten / Kota | Jumlah |
|----|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Kota Batam | 1.188.985 |
| 2 | Kota Tanjungpinang | 202.215 |
| 3 | Kab. Karimun | 225.298 |
| 4 | Kab. Bintan | 153.020 |
| 5 | Kab. Lingga | 88.591 |
| 6 | Kab. Natuna | 74.520 |
| 7 | Kab. Anambas | 40.414 |
| | Jumlah | 2.028.439 |

(3) Sumber daya alam

(a) Potensi Hutan

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat daerah perhutanan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Adapun daerah perhutanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau seperti di Bintan, Lingga dan Natuna. Sedangkan hutan bakau tersebar luas di seluruh pesisir Propinsi Kepulauan Riau.

(b) Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian dan perkebunan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak dijadikan mata pencaharian utama bagi penduduk yang disebabkan tanahnya yang kurang subur dan banyak mengandung bauksit, akan tetapi akhir-akhir ini pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota menggalakkan wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagai daerah pertanian seperti halnya Pulau Galang, Bintan dan Karimun sebagai penghasil tanaman palawija (sayur-sayuran dan umbi-umbian), cengkeh juga perkebunan sawit yang hasilnya dapat di konsumsi sendiri juga dapat di ekspor ke Luar Negeri.

(c) Potensi Kekayaan Laut

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dikelilingi lautan hampir tiga perempat luas wilayahnya. Potensi kekayaan laut cukup besar, sebagian masyarakat penduduk menggunakan mata pencaharian sebagai nelayan dan hasilnya cukup untuk kebutuhan daerah sendiri dan bagi pengusaha ikan juga ada juga yang melakukan pengiriman ke luar daerah seperti jambi juga Medan dan bahkan mengekspor ke Luar Negeri (Malaysia dan Singapore).

(d) Pertambangan

• **Timah**

Tambang Timah terdapat dan masih beroperasi di perairan Prayon Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun dan di Kab. Lingga, yang dikelola oleh :

- PT. Tambang Timah Unit Kundur, dengan jumlah eksport timah ke Singapura sebanyak 3.340 ton
- PT Eunindo Usaha Mandiri di perairan pulau Kenipan Kec. Kundur Barat dengan menggunakan Kapal Isap serta memiliki Smelter di Desa Pangke Kec Pangke
- PT. PENTA INTI MANDIRI, Alamat : Jl. Raja Haji Fisabillah Pantai Pelawan RT.

15 LAMPIRAN KEP DIRSABAHARA POLDA KEPRI
NOMOR :KEP / / XI / 2017 /DITSABHARA
TANGGAL : NOVEMBER 2017

03 RW. 03 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun Kepulauan Riau 29161, Lokasi Tambang : Blok IV Kec. Karimun dan Kec. Kundur Barat

- PT. Karimun MINING, Alamat : Jl. Nusantara No. 89 Kab. Karimun Kepulauan Riau 29161, Lokasi Tambang : Blok A Kec. Kundur, Blok B Kec. Karimun, Blok C Kec. Tebing.

- **Batu Granit**

Tambang Batu Granit di Wilayah Provinsi kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Karimun dan Kab. Bintan yang dikelola oleh :

- PT. Karimun GRANITE, Alamat : Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun;
- PT. PASIFIC GRANITAMA, Alamat : Jl. Pangka No. 88 Kec. Meral Tanjung Balai Karimun;
- PT. BUKIT ALAM PERSADA, Alamat : Bukit Jambang Desa Pangke Kec. Meral Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;
- PT. Bukit Granite Mining Mandiri Pongkar Tebing Karimun;
- PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA, Alamat : Bukit Potot Desa Pangka Kec. Meral Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;
- PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA, Alamat : Sememai Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- DAHANA, Bukit Meninjau Parit Benut Pangke Kec Meral Barat 0777-326054;
- PT. Mitra Investindi Tbk, berlokasi di Bukit Piatu Kecamatan Gunung Kijang,

penanggung.....

16 LAMPIRAN KEP DIRSABAHARA POLDA KEPRI
NOMOR :KEP / / XI / 2017 /DITSABHARA
TANGGAL : NOVEMBER 2017

penanggung jawab perusahaan an. DIAH PERTIWI GANDHI;

- PT. Bintang Nusamulti, berlokasi di Bukit Kijang Kecamatan Gunung Kijang, penanggung jawab perusahaan an. Sdr. SAKUR.

- **Batu / Biji Besi**

PT. Bina Perkasa di Desa Bakong Kec. Singkep Barat seluas 73 Ha, dengan Alamat Perusahaan Komplek Nagoya Garden Blok G No. 2-3 Batam Telp. 0778 457279. (Eksplorasi Bijih Besi).

- **Minyak Bumi / Gas**

Minyak Bumi yang terkandung di wilayah Kepulauan Riau terletak di wilayah kabupaten Natuna yang berlokasi di laut Cina Selatan dan terletak 296 Km sebelah Barat Pulau Natuna. Pegeboran Minyak Lepas Pantai dilakukan oleh beberapa perusahaan diantaranya:

- PT. MEDCO;
- PT. PRIMER OIL, Jumlah Karyawan terdiri dari 114 (Seratus Empat Belas) Karyawan, Alamat Perusahaan Matak Base Telp. 0215151800;
- PT. STAR ENERJIC;
- PT. PAN dengan jumlah Karyawan terdiri dari 185 (sertaus Delapan Puluh Lima) orang dengan jumlah Karyawan Asing Nihil. Alamat Perusahaan di Matak Kecil Desa Payalaman Kab. Anambas Telp. 0772-31328.

b) Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Keamanan

(1) Idiologi:

- (a) Masyarakat Provinsi Kepri pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, namun sudah ada indikasi kelompok/aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila (HTI, SYIAH dan GAFATAR);
- (b) Di Kepulauan Riau masih terdapat kelompok/suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepri yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir-pinggir pulau wilayah Kepri yang kemungkinan besar belum memiliki agama / kepercayaan (animisme), pendidikan / pengetahuan yang cukup tentang Pancasila sebagai idiologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
- (c) Bergesernya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik/lokasi usaha tertentu dengan tujuan melakukan dominasi dalam hal “pengamanan” sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mendompleng nama suku tertentu yang seakan - akan berlatar belakang SARA.

(2) Politik

(2) Politik:

- (a) Secara umum situasi politik di Kepri cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. namun terdapat beberapa kebijakan Pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif dan masih dapat diatasi dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif;
- (b) Kekosongan Wakil Gubernur Provinsi Kepri terjadi sehubungan telah dilantiknya Wakil Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2016 – 2021 Dr. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si menjadi Gubernur Provinsi Kepri dikarenakan telah meninggalnya Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2016 – 2021 Drs. H. M. SANI, sehingga terjadi manuver politik untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur Prov. Kepri yang berdampak pada gangguan Kamtibmas;
- (c) Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan Pemilihan umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang;
- (d) Dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepri diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing;
- (e) Rencana pemekaran wilayah terhadap Kab Kep. Kundur, Kota Natuna, Kab. Natuna Selatan, Kab. Natuna Barat yang diusulkan Gubernur Kepri ke Mendagri dengan nomor surat : 130-/0188/set tanggal 26 Februari 2016;

(f) Adanya

- (f) Adanya dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam, dimana sama-sama memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah Kota Batam. Kedua instansi tersebut berpegang kepada Peraturan Perundang masing-masing sehingga berdampak pada kepastian Hukum dalam berinvestasi.

(3) Ekonomi:

- (a) Tumpang Tindih dan Duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam yang dimana ada banyak aturan bahkan undang – undang tentang FTZ yang dinilai tidak efektif . Hal tersebut berdampak adanya wacana pembentukan KEK dan pembubaran terhadap BP Batam;
- (b) Adanya permasalahan tentang kampung tua yang dimana keberadaan Kampung Tua di Kota Batam sangat dipertahankan oleh masyarakat kota Batam terutama suku asli karena terdapat tapak perkampungan, situs purbakala,kuburan tua, bangunan bernilai budaya tinggi,silsilah keluarga melayu yang menginginkan kepastian status dari BP Batam.
- (c) Penolakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memberatkan warga masyarakat Kota Batam;
- (d) Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti adanya moda transportasi berbasis online yang menimbulkan pengaruh positif maupun negative, untuk dampak positif mempermudah dan memberikan kenyamanan masyarakat, sedangkan dampak negative menimbulkan penolakan moda transportasi konvensional;

(e) Wilayah

- (e) Wilayah Prov. Kepri bukan daerah penghasil kebutuhan konsumtif (sembako) sehingga untuk memenuhi kebutuhan Prov. Kepri menggantungkan supply dari luar Kepri. Hal ini menimbulkan spekulasi/import ilegal/penyeludupan sembako ke wilayah Prov. Kepri;
- (f) Pemasalahan sengketa lahan di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas yang disebabkan adanya dualisme kepemilikan sertifikat atas lahan yang disengketakan, khusus Pulau Batam terjadi dualisme Kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Penguasaan Batam (BP Batam);
- (g) Krisis listrik di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kab Karimun yang disebabkan karena seringnya pemadaman listrik yang disebabkan mesin rusak (Over Haul) tidak sesuai dengan kapasitas daya yang didistribusikan yang tidak disosialisasikan ke masyarakat oleh pihak PLN.

(4) Sosial Budaya:

- (a) Permasalahan pendirian rumah ibadah dan aktivitasnya di wilayah Kota Batam dan Tanjungpinang yang disebabkan disamping permasalahan lahan tersendiri yang bermasalah kebanyakan masyarakat kurang sosialisasi dan pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah ibadah;
- (b) Unjuk rasa dan mogok kerja disebabkan penolakan terhadap pembelakuan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang sistem pengupahan karena penentuan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi (IPE) yang digunakan berdasarkan kebutuhan pusat sedangkan kebutuhan masing-masing wilayah berbeda, serta penerapan struktur skala upah berdasarkan peraturan menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 1 Tahun

2017 tentang Struktur skala upah yang mana apabila suatu perusahaan tidak mempunyai struktur skala upah, Pemerintah seolah olah tidak mengambil tindakan apa-apa/sanksi.

(5) Keamanan:

- (a) Kejahatan yang bersifat konvensional dan menonjol masih akan terjadi pada tahun 2018 diantaranya adalah Curas yang dilakukan dengan modus pengancaman dengan senpi / sajam, penganiayaan, jambret serta Curat yang dilakukan dengan modus pecah kaca mobil, memotong / merusak gembok pintu / pagar, congkel jendela/ pintu, merusak atap serta meningkatnya peredaran senjata api gelap serta Narkoba;
- (b) Potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan radikalisme melalui sarana media massa maupun elektronik yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kekerasan di masyarakat Prov. Kepri;
- (c) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Prov. Kepri sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri;
- (d) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungan masyarakat;

(e) Kurangnya

- (e) Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- (f) Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
- (g) Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum;
- (h) Permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan;
- (i) Kejahatan yang melibatkan warga Negara Asing (WNA) baik sebagai pelaku maupun korban.

b. Analisis SWOT

Untuk menyusun kebijakan dan strategi yang tepat untuk dilaksanakan oleh Ditsabhara Polda Kepri perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas baik dari internal berupa aspek kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yang merupakan aspek peluang dan tantangan melalui metode SWOT:

1) Kekuatan (Strenght)

- a) Personel Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau saat ini berjumlah 195 orang yang terdiri dari 6 Pamen, 7 Pama dan 182 brigadir, namun tetap memiliki semangat kerja dan dedikasi yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

b) Adanya

- b) Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau berupa :

| No. | JENIS | JUMLAH | KET |
|-----|----------------|-----------|---|
| 1. | RANMOR | 99 UNIT | <ul style="list-style-type: none"> - 2 UNIT TRUCK DALMAS - 3 UNIT APC - 3 UNIT AWC - 3 UNIT BUS - 5 UNIT PATROLI DOUBLE KABIN - 2 UNIT SECURITY BARRIER - 4 UNIT RANSUS K-9 - 2 UNIT RANSUS SAR - 70 UNIT SEPEDA MOTOR <ul style="list-style-type: none"> - 40 UNIT R2 PATROLI - 30 UNIT R2 RAIMAS - 2 UNIT MOBIL BOX - 1 UNIT RAN PENMAS - 1 UNIT RANJAB DIREKTUR - 2 UNIT SEDAN PATROLI |
| 2. | ALUT DAN ALSUS | 1786 BUAH | <ul style="list-style-type: none"> - 278 BUAH HELM DALMAS - 252 BUAH TAMENG DALMAS - 200 BUAH TONGKAT T POLRI - 60 BUAH PAKAIAN PELINDUNG - 235 BUAH ROMPI & PELINDUNG KAKI/TANGAN - 20 BUAH ROMPI ANTI PELURU - 30 BUAH HANDY TALKY - 7 BUAH TOOL KIT SET - 97 BUAH ROMPI SAJAM & TACTICAL RIOT GEAR - 1 SET SABHARA RESCUE KIT - 1 SET ALAT DALMAS/DAKHURA - 141 BUAH GAS MASKER - 9 BUAH ALAT KHUSUS KEPOLISIAN - 21 BUAH APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN) |

24 LAMPIRAN KEP DIRSABAHARA POLDA KEPRI
 NOMOR :KEP / / XI / 2017 /DITSABHARA
 TANGGAL : NOVEMBER 2017

| | | | |
|----|----------------|----------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 1 MERIAN AIR - 10 BUAH MEGAFOUND - 5 BUAH KAMERA VIDEO - 2 BUAH KAMERA PHOTO - 55 FLASH BALL <ul style="list-style-type: none"> - 32 FLASHBALL PANJANG - 20 FLASHBALL PENDEK - 3 PORTABLE MULTILAUNCHER - 165 BORGOL - 166 TONGKAT PANJANG - 30 JAKET PELINDUNG |
| 3. | SENJATA API | 240 PUCUK | <ul style="list-style-type: none"> - 49 PUCUK REV TAURUS - 55 PUCUK SV2 - 5 PUCUK AR 15/M16 - 3 PUCUK MK3 - 5 PUCUK PISTOL P-2 PINDAD - 45 PUCUK ELECTRIC GUN - 23 PUCUK PAPER GUN |
| 4. | AMUNISI | 23015 BUTIR | <p>PELURU TAJAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5459 SV2 KAL 7,62X45 - 5750 REV KAL 38 - 500 P2 PINDAD KAL 9X19mm - 5000 MK 3 - 2000 AR15/M16 KAL 5, 56 <p>PELURU KARET</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1900 SV2 KAL 7,62X45 - 985 REV KAL 38 <p>PELURU GAS AIR MATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - FLASHBALL PANJANG <ul style="list-style-type: none"> - 471 KAL 44 CS SMOKE (KUNING) - 462 KAL 44 CS POWDER (MERAH) - 219 38 mm TEAR GAS - FLASHBALL VERNY CORRON <ul style="list-style-type: none"> - 245 VERNY CORRON - PORTABLE ACOUSTIC MULTI LAUNCHER <ul style="list-style-type: none"> - 24 38 RUBER BULLET |
| 5 | ANJING | 8 EKOR | |

- c) Dukungan anggaran Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau TA. 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 15.72 % dibandingkan dengan anggaran TA. 2017 namun untuk belanja barang mengalami kenaikan sebesar 16.71 % dan saat ini seluruh anggaran Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau telah didistribusikan kepada para Kabag, Kasubdit dan Kasubag, sehingga para Kabag, Kasubdit dan Kasubag lebih dini telah membuat rencana kegiatan yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
- d) Dengan terpenuhinya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personel Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau telah memberikan dorongan, semangat dalam melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a) Dengan adanya Perkap Nomor 22 tahun 2010 yang dinyatakan berlaku terhitung tanggal 28 September 2010, maka jumlah kekuatan personel Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau belum memenuhi DSP sebanyak 457 orang, saat ini jumlah riil baru 195 orang atau kurang 262 orang sehingga pelaksanaan tugas belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b) Kurangnya jumlah perwira yang mengawaki setiap subdit dan subbag di Ditsabhara Polda Kepri;
- c) Sarana prasarana yang ada saat ini sudah memadai namun anggaran pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor yang ada pada Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau T.A 2017 belum ideal sehingga mempengaruhi kesiapan operasional sarana dan prasarana;
- d) Masih terkendalanya dalam hal komunikasi dengan satuan kewilayahan, mengingat Alkom yang ada baik telphon, HT maupun alat komunikasi lainnya sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan dalam penyampaian informasi dan komunikasi.

3) Peluang

3) Peluang (Opportunities)

- a) reformasi di tubuh Polri diharapkan dapat merubah kultur kearah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Kepulauan Riau;
- b) keikutsertaan masyarakat dan kelompok masyarakat Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan perpolisian masyarakat termasuk kesediaan membantu memberikan informasi, merupakan salah satu bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap tugas-tugas Kepolisian;
- c) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polda Kepri yang ada pada semua tingkatan Pemerintahan;
- d) meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polda Kepulauan Riau agar lebih mendekatkan pelayanan masyarakat dapat mendorong Polda Kepulauan Riau untuk lebih profesional, modern dan terpercaya;
- e) kerjasama Polda Kepulauan Riau dengan berbagai instansi/lembaga terkait baik pemerintah/non pemerintah serta dengan Kepolisian Negara Malaysia .

4) Ancaman (Threats)

- a) kecendrungan meningkatnya empat jenis kejahatan (Konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekwensi bagi pelaksanaan tugas Polda Kepulauan Riau;
- b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi selain berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga berdampak negatif yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan;
- c) gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di

beberapa daerah yang disebabkan oleh berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;

- d) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- e) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum dilapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu masalah;
- f) Posisi Batam sebagai Kota industri dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mempunyai konsekuensi menjadi kiblat seluruh wilayah/daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di daerah akan dibawa ke Batam untuk mendapatkan penyelesaian yang dinilai adil. Disamping itu juga kota Batam menjadi pintu masuk berbagai hal dari luar negeri, sehingga kota Batam juga mengemban tugas sebagai etalase bagi masyarakat Internasional dalam memandang Indonesia;
- g) Batam sebagai Kota Industri menarik berbagai masyarakat di seluruh Indonesia untuk datang termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang *unskill*/tidak memiliki keterampilan, akibatnya Batam dipenuhi oleh problematika sosial yang pada akhirnya bermuara pada gangguan Kamtibmas seperti meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS dan lain-lain, sehingga perlu kesiapan Polri dalam melayani masyarakat;
- h) Dalam implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Buruh / Mahasiswa/Ormas/LSM/kelompok masyarakat lainnya, terdapat kecenderungan pelaksanaan unjuk rasa yang tidak terkendali/ kebablasan/melanggar hukum, bahkan disertai dengan tindakan anarkis, seperti mengganggu keamanan, dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum/milik negara, menghina Presiden/pejabat tertentu/lambang negara tertentu,

melakukan.....

melakukan fitnah, Merusak rumah/kendaraan/barang milik orang lain dan menyerang petugas/aparat keamanan;

- i) Tingginya angka pengangguran di Batam sebagai akibat dari enggannya Investor asing menanamkan modalnya di Batam karena tidak ada kepastian hukum, regulasi tidak memihak kepada investor, panjangnya rantai birokrasi perijinan, dan rancunya berbagai peraturan pajak;
- j) Masih banyak terjadi tumpang tindih dokumen kepemilikan tanah di wilayah Batam dan Tanjungpinang bila diselesaikan secara hukum akan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pihak-pihak yang terlibat untuk menguasai secara phisik, tidak segan-segan menyewa dan menggunakan jasa preman. Hal demikian sangat rawan terjadi bentrok antar preman dengan membawa etnik kedaerahan asal mereka;
- k) Wilayah hukum Polda Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau besar dan kecil terdiri dari 1.068 berpenghuni dan 800 tidak berpenghuni, 96 % perairan dan 4 % daratan serta memiliki pelabuhan laut baik pelabuhan domestik, internasional maupun pelabuhan *illegal* (tikus) yang merupakan wilayah transit bagi mobilitas orang dan barang, hal tersebut menjadi peluang bagi masuknya barang-barang ilegal serta pelarian dan persembunyian para pelaku kejahatan Narkoba, teroris dan dari daerah/Negara lain.

2. Identifikasi Masalah

a. Bidang Personel

- a) Belum terpenuhinya sesuai DSP kekuatan personel Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau dengan adanya Perkap Nomor 22 tahun 2010 yang dinyatakan berlaku terhitung tanggal 28 September 2010, maka jumlah kekuatan personel Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau belum memenuhi DSP sebanyak 457 orang, saat ini jumlah riil baru 195 orang atau kurang 262 orang.

b) Masih.....

- b) Masih terbatasnya personel Direktorat Sabhara yang memiliki kualifikasi kemampuan di bidang Dalmas, SAR, Negosiator dan Tipiring untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kemampuan.
- c) Masih terdapat kekosongan pada jabatan struktural di lingkungan Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Masih terkendalanya dalam hal komunikasi dengan satuan kewilayahan, mengingat Alkom yang ada baik telphon, HT maupun alat komunikasi lainnya sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
- 2) Alokasi dukungan Harwat masih kurang.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja personel (Komputer, Laptop, Infocus dan Layar Infocus, Printer dan Mesin Fotocopy).

c. Bidang Anggaran

- 1) Anggaran yang terdapat dalam DIPA Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau masih belum mendekati pada kebutuhan ideal, pengalokasian anggaran masih dibatasi dengan pagu definitif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Masih kurangnya pagu anggaran pemeliharaan dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana sehingga berakibat kondisi sarana dan prasarana tidak optimal.

d. Bidang Pengawasan

- 1) Pengawasan internal terhadap program kegiatan dan personel belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya kekosongan jabatan struktural yang ada di lingkungan Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau.
- 2) Pelaporan pelaksanaan tugas sebagai sarana pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan optimal karena keterbatasan kemampuan personel pelaksana tugas.

II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas

Pelaksanaan tugas Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polda, sangatlah dipengaruhi oleh berbagai aspek perkembangan kehidupan masyarakat dan faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, oleh karena itu untuk menentukan arah yang lebih konsisten dalam pelaksanaannya, Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi tahun 2018 sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Kepulauan Riau

1) Visi Polda Kepulauan Riau

Terwujudnya Polda Kepri yang Profesional, Modern dan Terpercaya.

2) Misi Polda Kepulauan Riau

- a) mewujudkan postur Polda Kepri yang ideal, efektif dan efisien;
- b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Kepri melalui pendidikan dan latihan;
- c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polda Kepri yang profesional dan akuntabel;
- g) Mengelola keamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas.

b. Visi

b. Visi dan Misi Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau

1) Visi Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau

Terwujudnya postur Ditsabhara Polda Kepri yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, yang mampu menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegakan hukum dengan sinergi polisional proaktif guna mendukung terciptanya wilayah Polda Kepri yang berdaulat mandiri dan berkepribadian serta terjalinnya kemitraan dengan masyarakat berlandaskan kegotong-royongan untuk memantapkan kamtibmas Provinsi Kepulauan Riau.

2) Misi Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau

- a) mewujudkan postur Ditrektorat Sabhara Polda Kepri yang ideal, efektif dan efisien;
- b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditrektorat Sabhara Polda Kepri melalui pendidikan dan latihan;
- c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Ditrektorat Sabhara Polda Kepri yang profesional dan akuntabel;

2. Tujuan

a. Tujuan Polda Kepulauan Riau

- 1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polda Kepri;
- 2) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN di wilayah Polda Kepri;
- 3) terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian di wilayah Polda Kepri.

b. Tujuan Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau

- 1) Mewujudkan kemampuan dan peran Ditsabhara Polda Kepri yang profesional, bermoral, dan modern, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peranannya.
- 2) Pergelaran Kekuatan Ditsabhara Polda Kepri sampai pada tingkat Polres dan Polsek.
- 3) Mewujudkan kemampuan anggota Ditsabhara Polda Kepri dengan memiliki 6 (Enam) kemampuan Sabhara Turjawali, Tipiring, Negosiator, Dalmas, SAR, dan TPTKP;

3. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polda Kepulauan Riau Tahun 2018

Berdasarkan tahapan capaian Renstra Polda Kepri Tahun 2018 dengan capaian: "Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polda Kepri guna menghadapi berbagai tantangan tugas", maka sasaran prioritas Polda Kepri tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pertama** "Meningkatnya profesionalisme personel Polda Kepri dan pementapan manajemen internal Polda Kepri";
- 2) **Kedua** "Meningkatnya kesejahteraan personel Polda Kepri";
- 3) **Ketiga** "Menguatnya sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)";
- 4) **Keempat** "Meningkatnya kerja sama dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah daerah";
- 5) **Kelima** "Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat";
- 6) **Keenam** "Tergelarnya personel dan Sarpras Polda Kepri diperairan, kepulauan dan perbatasan";
- 7) **Ketujuh** "Terpeliharanya situasi aman dan tertib di wilayah hukum Polda Kepri";
- 8) **Kedelapan** "Terlaksananya penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel dan anti KKN".

b. Sasaran.....

b. Sasaran Prioritas Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018

Berdasarkan tahapan capaian Renstra Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018 dengan capaian: "Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polda Kepri guna menghadapi berbagai tantangan tugas", maka sasaran prioritas Ditsabhara Polda Kepri tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pertama** "Meningkatnya profesionalisme personel Ditsabhara Polda Kepri dan pematapan manajemen internal Ditsabhara Polda Kepri";
- 2) **Kedua** "Meningkatnya kesejahteraan personel Ditsabhara Polda Kepri";
- 3) **Ketiga** "Menguatnya sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)";
- 4) **Keempat** "Meningkatnya kerja sama dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah daerah";
- 5) **Kelima** "melaksanakan dan meningkatkan pelayanan masyarakat melalui kegiatan Turjawali, Pam unras, Dalmas, serta SAR";
- 6) **Keenam** "pergelaran kekuatan Ditsabhara Polda Kepri sampai pada tingkai Polres dan Polsek";
- 7) **Ketujuh** "Terlaksanannya pemeliharaan ketertiban umum di wilayah Provinsi Kepri";
- 8) **Kedelapan** "Melaksanakan penegakan hokum Tipiring, secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi Hukum, HAM , bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya".

III. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepri Tahun 2018

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kepri Tahun 2018 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. sasaran prioritas **“Meningkatnya profesionalisme personel Polda Kepri dan pematapan manajemen internal Polda Kepri”**, dicapai melalui kebijakan dan strategi :

1) **Arah kebijakan** “Peningkatan kapasitas personel” dengan **strategi** :

- a) mengirim personel Polda Kepri untuk mengikuti Dikbangspes fungsi;
- b) melaksanakan latihan fungsi teknis kepolisian guna pemeliharaan, peningkatan dan kemampuan personel Polda Kepri;
- c) melaksanakan pembinaan kerohanian dan mental serta kesamaptaan jasmani personel Polda Kepri;
- d) meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat kerjasama dengan pers/mass media;
- e) memperkuat soliditas internal melalui internalisasi kecintaan pada organisasi, *Commander Wish* (fokus pada tugas), membangun komunikasi terbuka antar pimpinan dengan pimpinan , dan pimpinan dengan bawahan.

2) **Arah kebijakan** “Melaksanakan pembinaan karier secara transparan, akuntabel berdasarkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi” dengan **strategi** :

- a) Membuat aplikasi rekam jejak Personel Polda Kepri dan mengintegrasikan dengan Satker penanggung jawab komponen rekam jejak;
- b) seleksi pendidikan pengembangan umum Polri yang transparan dan akuntabel;
- c) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan dengan menggunakan system Computer Assisted Test (CAT);

d) pemanfaatan.....

- d) pemanfaatan assesment center dalam rangka pembinaan karier Personel Polda Kepri.
- 3) **Arah kebijakan** “Melaksanakan penerimaan anggota Polri” dengan **strategi** :
- a) menyelenggarakan kampanye penerimaan anggota Polri melalui Taruna Akpol, SIPSS, Bintara dan Tamtama secara *massive* sepanjang hari sepanjang Tahun untuk memperoleh calon personel Polri yang berkualitas;
 - b) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekrutmen personel Polri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal;
 - c) Melaksanakan pembinaan sejak dini putra daerah (anak Pulau) untuk mampu bersaing dalam rekrutmen anggota Polri dengan tetap mengutamakan kualitas;
 - d) Melaksanakan seleksi Diktuk anggota Polri dalam pentahapannya dengan menggunakan *system one day service and one day result*.
- 4) **Arah kebijakan** “Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT disetiap satuan kerja” dengan **strategi** :
- a) Mengintegrasikan system teknologi informasi di Satker jajaran Polda Kepri;
 - b) Penambahan kapasitas Bandwidth untuk Satker- satker Polda dan jajaran;
 - c) meningkatkan penerapan system informasi manajemen melalui aplikasi *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound* (SMART);
 - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
 - e) Meningkatkan pengawasan SDM;
 - f) Meningkatkan penerapan *reward and punishment* di Satuan Kerja.

- 5) **Arah Kebijakan** “Mengusulkan Kebutuhan Anggaran Polda Kepri yang Proporsional Sesuai dengan Beban Kerja” dengan **Strategi**:
 - a) menyusun anggaran Polda Kepri sesuai dengan kebutuhan;
 - b) mengusulkan kebutuhan anggaran Polda kepri.

- 6) **Arah kebijakan** “Pengembangan organisasi Polda Kepri” dengan **strategi** :
 - a) mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta Bareleng, Polres Karimun, Tanjungpinang dan Kepulauan Anambas;
 - b) peningkatan Tipologi Polres dan Polsek jajaran Polda Kepri;
 - c) mengusulkan pembentukan Polsubsektor jajaran Polda Kepri;
 - d) Pengusulan Rumah Sakit Bhayangkara tingkat IV Polda Kepri sebagai Satker tersendiri.

- b. Sasaran prioritas “**Meningkatnya kesejahteraan personel Polda Kepri**” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
 - 1) **Arah kebijakan** “Meningkatkan pelayanan kesehatan personel Polda Kepri” dengan **strategi** :
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi personel jajaran Polda Kepri di Poliklinik dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri serta bekerjasama dengan BPJS;
 - b) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Rumah sakit dan poliklinik Polda Kepri;
 - c) Menyelenggarakan kerja sama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik/lebih tinggi
 - d) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi personel Polda Kepri;
 - e) menghimpun dan mendata Pegawai Negeri pada Polda Kepri dan keluarga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS).

- 2) **Arah kebijakan** “Peningkatan pemenuhan Rumah Dinas dan perumahan bagi personel Polda Kepri” dengan **strategi** :
 - a) mengusulkan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Kepri umumnya dan yang di daerah perairan, kepulauan dan perbatasan berupa rumah dinas, mess atau flat.
 - b) Menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat.
 - c) Mempermudah personel Polda Kepri untuk mendapatkan Perumahan bekerja sama dengan ASABRI dan pihak pengembang/developer;
- 3) **Arah kebijakan** “Peningkatan tunjangan khusus bagi personel Polda Kepri di perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni” dengan **strategi** :
 - a) Melakukan pendataan daerah-daerah yang berhak mendapatkan tunjangan khusus perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;
 - b) Mengusulkan tunjangan khusus perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni.
- 4) **Arah kebijakan** “Melaksanakan program wirausaha bagi personel Polda Kepri” dengan **strategi** :
 - a) Membuat program Wirausaha bagi personel Polda Kepri yang akan memasuki pensiun;
 - b) Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan balai latihan kerja untuk program wirausaha.
- 5) **Arah kebijakan** “Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi personel Polda Kepri” dengan **strategi** :
 - a) Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan ASABRI di Prov Kepri untuk meningkatkan pelayanan ASABRI bagi personel Polda Kepri;
 - b) Memfasilitasi

- b) Memfasilitasi personel Polda Kepri yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari ASABRI;
- c. Sasaran Prioritas **“Menguatnya sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang di seluruh Satker” dengan **strategi** :
 - a) mengembangkan sistem pengawasan berbasis *online*;
 - b) mengoptimalkan pengendalian mutu wasrik;
 - c) meningkatkan maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan;
 - d) meningkatkan kapabilitas APIP Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan.
 - 2) **Arah kebijakan** “Memperkuat kerja sama dengan pengawas eksternal dengan “Eksternal Memanfaatkan Internal” (EMI) dan “Internal Mendukung Eksternal” (IME) dengan **strategi** :
 - a) mengusulkan dan mengikutsertakan personel Polda Kepri dalam rangka mengikuti Diklat peningkatan kompetensi APIP yang diselenggarakan oleh Mabes Polri;
 - b) percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audiit BPK RI pada satker di lingkungan Polda Kepri;
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
 - d) perbantuan auditor BPKP pada Itwasda Polda Kepri sebagai konsultan dalam pelaksanaan audit di lingkungan Polda Kepri;
 - e) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat berbasis internet dan online dengan Bagian Pelayanan dan pengaduan Bidpropam Polda Kepri.

3) **Arah**

- 3) **Arah kebijakan** “Mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi dengan **strategi** :
 - a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Kepri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
 - b) meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka menumbuhkan budaya tertib hukum dalam kehidupan personel Polda Kepri;
 - c) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri;
 - d) mengoptimalkan pengamanan internal ditempat pelayanan Polri.
- 4) **Arah kebijakan** “Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK)” dengan **strategi** melanjutkan penguatan tata kelola kepolisian pada tujuh prinsip bidang kompetensi, keadilan, perilaku, efektifitas, transparansi, responsif dan akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) Polri.
- 5) **Arah kebijakan** “Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal dengan **strategi** :
 - a) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Polda Kepri yang wajib melapor;
 - b) internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polda Kepri;
 - c) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha atau bisnis personel Polda Kepri;
 - d) mengoptimalkan *whistle blower system* di lingkungan Polda Kepri;
 - e) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polda Kepri.
- 6) **Arah kebijakan** “Melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker” dengan **strategi** :

a) peningkatan

- a) peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Polda Kepri secara bertahap dan berkelanjutan;
 - b) pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tingkat Polres dan satker jajaran Polda Kepri;
 - c) Mengusulkan Satker di lingkungan Polda Kepri ke Mabes Polri untuk dilakukan penilaian zona integritas menuju WBK.
- d. Sasaran prioritas **“Meningkatnya kerja sama dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemda”**, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Mengoptimalkan sinergitas dengan aparat penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri” dengan **strategi** :
 - a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Singapura dan Malaysia dalam penanganan kejahatan transnasional di wilayah perairan perbatasan;
 - b) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan, Pengadilan, Kumham, KPK, OJK, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea cukai) dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta penapsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
 - c) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakan ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (Penegakan Tipiring) terkait dengan Perda.
 - 2) **Arah kebijakan** “Mengoptimalkan Kerja sama antar instansi terkait” dengan **strategi** :
 - a) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan operasi Kepolisian;
 - b) Melakukan evaluasi terhadap MoU yang sudah ada;
 - c) mengoptimalkan Satgas penanggulangan bencana, konflik sosial dan terorisme.
 - 3) **Arah kebijakan** “Menjalin Kerjasama dengan pihak Swasta dan komponen Masyarakat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas” dengan **strategi** :

a) menjalin

- a) menjalin kerjasama dengan pengelola Objek Vital / pihak swasta;
 - b) menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok/elemen masyarakat dalam upaya keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas.
- 4) **Arah kebijakan** “Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan *stakeholders* terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online) serta mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif” dengan **strategi** :
- a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media online);
 - b) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemerintahan melalui kegiatan BAKO Humas;
 - c) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
 - d) melaksanakan *counter* opini melalui media social.
- e. Sasaran prioritas “**Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat**”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Melaksanakan pelayanan masyarakat dengan system yang berbasis IT” dengan **strategi** :
 - a) meningkatkan kualitas pelayanan dibidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) dengan system pelayanan yang berbasis IT;
 - b) meningkatkan pelayanan dibidang Intelkam melalui SKCK dan Izin keramaian secara *online*;
 - c) pelayanan dibidang penegakan hukum melalui SP2HP dan publik komplain *online*;
 - d) pelayanan dibidang pengaduan masyarakat secara online;
 - e) pelayanan dibidang Binmas dengan penerbitan KTA dan ijazah Satpam dan SIO (Surat ijin operasional) BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan).

- 2) **Arah kebijakan** “Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik” dengan **strategi** :
 - a) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian *reward and punishment* secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan;
 - b) melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan public Polri khususnya pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) dan pelayanan SKCK.

- 3) **Arah kebijakan** “Peningkatan layanan ruang pelayanan khusus Kepolisian (RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan **strategi** :
 - a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak UPPA;
 - b) meningkatkan jumlah ruangan dan kualitas sarana pelayanan yang ada di RPK disesuaikan dengan standar fungsinya;
 - c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;
 - d) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPS pada Bareskrim Polri, jajaran Polda, Polres dan Polsek sebagai mencari sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap PA;
 - e) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai PPA dengan melibatkan ahli/konsultan.

- 4) **Arah kebijakan** “Perbaikan ruang SPKT” dengan **strategi** :
 - a) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi SPKT yang bersahabat sehingga masyarakat tidak merasa takut bila akan datang untuk meminta bantuan;
 - b) membangun ruangan untuk SPKT dengan dilengkapi sarana pendukung agar bila ada masyarakat yang datang meminta bantuan merasa nyaman dan tenang.

- 5) **Arah kebijakan** “Percepatan *quick respons* Kepolisian” dengan **strategi** :
- a) meningkatkan turjawali yang mengutamakan patroli dialogis;
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana (almatsus Polda Kepri);
 - c) menyusun/revisi SOP tentang *quick respons* Kepolisian di wilayah hukum Polda Kepri.
- 6) **Arah kebijakan** “Pelaksanaan system e-tilang” dengan **strategi** :
- a) melaksanakan pelatihan secara bertahap kepada para petugas tilang dalam menggunakan aplikasi e-tilang;
 - b) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang adanya e-tilang;
 - c) bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses mekanisme penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-tilang;
 - d) menyiapkan pembuatan, uji coba, instalasi aplikasi web interface Kejaksaan, aplikasi web interface Pengadilan Negeri, aplikasi web interface Polri, aplikasi android e-tilang;
 - e) perawatan aplikasi e-tilang;
 - f) pengadaan koneksi internet, paket data dan sms gateway;
 - g) penyediaan insentif untuk petugas *call center/help desk* dan petugas bamin tilang;
 - h) penyediaan insentif untuk petugas tilang.
- 7) **Arah kebijakan** “Pengembangan SPPA berbasis TI terkait penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)” dengan **strategi** :
- a) membangun Sistem untuk mengintegrasikan sarana pendataan secara *online (web based system)* yang dikelola oleh Aparat Penegak Hukum dan Lembaga yang menangani ABH antara lain Penyidik jajaran (Reskrim, Lantas dan Sabhara), Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi, Dinsos, Bapas, P2TP2A/KPPPA serta Pusiknas Bareskrim Polri

sebagai pusat informasi dan menjadi sarana Anev dalam penanganan ABH;

- b) membangun sarana e-koordinasi dan *e-learning* yang terintegrasi dalam system.
- f. Sasaran Prioritas **“Tergelarnya personel dan Sarpras Polda Kepri diperairan, kepulauan dan perbatasan”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Meningkatkan pengamanan perairan, kepulauan dan perbatasan” dengan **strategi** :
 - a) melaksanakan patroli perairan (merangkai pulau menyatukan hati) dan Binmas perairan sampai pulau-pulau terluar berpenghuni;
 - b) meningkatkan patroli di wilayah perairan perbatasan Negara;
 - c) pemenuhan kebutuhan personel dan peralatan khusus perairan, kepulauan dan perbatasan;
 - d) Pergelaran alkom di Polres jajaran untuk mengcover jaringan komunikasi yang terintegritas antara Polda dan Polres khususnya di wilayah hukum Polres Tanjungpinang dalam rangka mendukung Pilkada Tahun 2018;
 - e) koordinasi dan kerjasama dengan Bakamla, Basarnas Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov Kepri.
 - 2) **Arah kebijakan** “Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan badan Nasional pengelola perbatasan, beacukai, imigrasi, karantina, TNI dan Pemerintah Daerah” dengan **strategi** Menyusun Mou dengan pihak terkait.
- g. Sasaran prioritas **“Terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Kepri”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial” dengan **strategi** :

a) tergelarnya

- a) tergelarnya kegiatan intelijen dengan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, cegah dini) melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan Pemerintah Daerah;
 - b) mempersiapkan personel dan peralatan yang siap untuk digunakan dalam rangka mengeliminasi setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
 - c) menyajikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat guna menurunkan potensi gangguan keamanan;
 - d) meningkatkan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam melakukan pemetaan potensi konflik disatuan wilayah bersinergi dengan Bhabinkamtibmas;
 - e) mengoptimalkan deteksi aksi dalam rangkaian pengamanan pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan persiapan Pilpres Tahun 2019;
 - f) pemberdayaan pembentukan jaringan dan pembinaan jaringan sampai dengan tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehingga permasalahan bidang IPOLEKSOSBUDKAMNEG dapat terdeteksi secara dini;
 - g) mengoptimalkan penggalangan individu, kelompok radikal, pro kekerasan dan intoleransi, terorisme dan paham ISIS;
 - h) mengoptimalkan dan mengupdate data base terkait intel dasar, perkiraan intelijen dan perkiraan kontijensi yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan;
 - i) mengantisipasi dan menanggulangi dampak implementasi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) sebagai pasar tunggal dimana terjadinya arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil.
- 2) **Arah kebijakan** “Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Keamanan , Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) darat dan perairan/laut” dengan **strategi** :

a) melaksanakan

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b) penanganan kecelakaan lalu lintas;
 - c) melaksanakan kajian *black spot* dan *trouble spot* kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - d) membangun RTMC dan TMC;
 - e) membangun budaya tertib lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, kemitraan dan penegakan hukum;
 - f) melaksanakan patroli dan Binmas perairan serta sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (*life jacket*);
 - g) melaksanakan koordinasi dengan Dinas perhubungan, KPLP, BMKG, TNI AL dan Basarnasda Provinsi Kepri serta *stakeholder* lainnya untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan di perairan/laut.
- 3) **Arah kebijakan** “Menggelar Polisi berseragam ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas” dengan **strategi** :
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli ditempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas;
 - b) menghadirkan anggota Polri disetiap kegiatan masyarakat;
 - c) melaksanakan *Quick Respons* setiap permasalahan yang ada di masyarakat;
 - d) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta pengamanan *event* Daerah, Nasional maupun internasional;
 - e) memperkuat perlindungan anak dan wanita dengan pemberdayaan Polwan;
 - f) Pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkhis.

- 4) **Arah kebijakan** “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peran Bhabinkamtibas di desa/kelurahan” dengan **strategi** :
- a) meningkatnya pertemuan Bhabinkamtibas dengan komunitas yang ada di masyarakat;
 - b) memberdayakan Bhabinkamtibas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membina dan memberdayakan Pamswakarsa;
 - c) mendorong pemanfaatan peralatan pengamanan seperti pemasangan CCTV di bangunan rumah, kantor dan di jalan untuk membantu pengamanan lingkungan;
 - d) menambah jumlah anggota Bhabinkamtibas secara bertahap dalam rangka mewujudkan penggelaran satu Polisi (Bhabinkamtibas) satu desa/kelurahan;
 - e) memberdayakan Bhabinkamtibas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat/mendukung organisasi radikal dan anti Pancasila;
 - f) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibas dalam deteksi dini dan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas;
 - g) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibas yang berprestasi dalam bidang Kamtibmas.
- 5) **Arah kebijakan** “Pengamanan Pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 serta persiapan Pam Pileg dan Pilpres Tahun 2019” dengan **strategi** :
- a) Melaksanakan *mapping* potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan daerah rawan Pilkada Walikota Tanjungpinang;
 - b) Melaksanakan koordinasi dengan Penyelenggara dan peserta Pilkada Walikota Tanjungpinang (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada);

c) Mempersiapkan

- c) Mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 - d) Mempersiapkan asta siap Pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 - e) Mempersiapkan Tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 - f) Mempersiapkan system informasi teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 - g) Melaksanakan anev pelaksanaan Pam Pilkada Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- h. Sasaran prioritas **“Terlaksananya penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel dan anti KKN”** dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
- 1) **Arah kebijakan** “Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, *illegal fishing*, korupsi, Narkoba, kejahatan cyber dan kejahatan ekonomi lainnya secara proporsional dan efektif” dengan **strategi** :
 - a) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas: tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b) mengintensifkan pemberantasan terhadap kejahatan diwilayah perairan seperti Narkoba, *illegal fishing*, perdagangan orang, *illegal logging*, pertambangan liar dilaut, perompakan dilaut dan tindak pidana perairan lainnya;
 - c) membangun kemampuan pemeriksaan barang bukti (BB) dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam suatu tindak pidana secara ilmiah/*Criminal Scientific Investigation* (SCI) pada Puslabfor/ Pusinafis dalam proses pengungkapan kasus;
 - d) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan;
 - e) Mengoptimalkan

- e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
 - f) mengusulkan peningkatan anggaran lidik sidik yang cukup sampai dengan tingkat Polsek.
- 2) **Arah kebijakan** “Peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik” dengan **strategi** :
- a) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personil fungsi reskrim yang handal;
 - b) mengembangkan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dan pemenuhan kebutuhan visum;
 - c) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai *Scientific Crime Investigation*;
 - d) Melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana.

Arah kebijakan “Penanganan kebakaran hutan dan lahan” dengan **strategi** meningkatkan sinergitas/kerjasama dengan Pemda (Dinas kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian) dan instansi terkait lainnya, dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kepri.

IV. Arah Kebijakan dan Strategi Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018

1. Arah Kebijakan Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas “**Meningkatkan profesionalisme serta penguasaan ilmu dan teknologi Modern bagi personel Polda Kepri melalui pendidikan dan latihan**”, yaitu:

- a. **Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Ditsabhara polda Kepri;**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Ditsabhara Polda Kepri yang akan dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan

- 1) Meningkatkan Profesionalisme personel sabhara polda kepri dengan mengikut sertakan personel Ditsabhara dalam pendidikan kejuruan, pelatihan / Dikbangspes fungsi sabhara dan fungsi pendukung lainnya;
 - 2) Melaksanakan latihan fungsi teknis kepolisian guna pemeliharaan, peningkatan dan kemampuan personel Polda Kepri khususnya personel polwan melalui program Polwan tangguh;
 - 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas komunikasi personel Ditsabhara dengan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama dengan pers/mass media dalam rangka peningkatan *public trust/* kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
2. Arah Kebijakan Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran “Terpeliharanya situasi aman dan tertib di masyarakat melalui kegiatan Turjawali di wilayah Polda Kepri serta terselenggaranya pengamanan Pilkada serentak gelombang II tahun 2017” yaitu **Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan.**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Ditsabhara Polri yang akan dilakukan adalah;

- a. Meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat rawan guna mencegah terjadinya kejahatan dengan mengoptimalkan patroli dialogis sebagai perwujudan personel Ditsabhara Polda Kepri yang unggul, tangguh, disiplin dan humanis;
- b. Menghadirkan personel Ditsabhara Polda Kepri di setiap kegiatan masyarakat;
- c. Penempatan personel di daerah rawan kejahatan dan kemacetan lalu lintas melalui patrol dialogis dan premanisme;
- d. Meningkatkan keamanan pada kawasan Industri perkantoran lembaga negara, perwakilan asing, pariwisata dan perbankan yang menjadi objek objek vital nasional /vital lainnya sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi investor/pelaku usaha sehingga menumbuhkan serta mendatangkan investor lainnya dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta melaksanakan penyekatan dan penegakan hukum terhadap demo anarkhis;

3. Arah Kebijakan Ditsabhara Polda Kepri Tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peran serta aktif dalam mendukung kegiatan Turjawali Personel”**, yaitu:

a. **Pemantapan pelaksanaan Turjawali personel Ditsabhara dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Turjawali;**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Ditsabhara Polda Kepri yang akan dilakukan adalah:

- 1) Membina dan memberdayakan Pamswakarsa;
- 2) Memberdayakan anggota turjawali untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat;
- 3) Mengintensifkan Polmas dalam pembinaan Kamtibmas;
- 4) Mendorong pemanfaatan “alat pengamanan” untuk membantu pengamanan lingkungan;
- 5) Menambah jumlah anggota Turjawali secara bertahap dalam rangka mewujudkan penggelaran satu Polisi (Turjawali) satu desa/kelurahan;
- 6) Melalui patroli dialogis untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang organisasi radikal dan anti Pancasila;
- 7) Meningkatkan kemampuan anggota Ditsabhara melalui deteksi dini dan cegah dini untuk menimalisir potensi gangguan kamtibmas dan gejolak sosial;

4. Arah Kebijakan Polda Kepri Tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas **“tercapainya sasaran reformasi Birokrasi Polri dan Quick Wins Ditsabhara Polri di Polda Kepri dan jajaran”**, yaitu:

a. **Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sasaran Reformasi Birokrasi Polri dan Quick Wins Polri dalam bentuk Satgas tingkat Polda Kepri dan jajaran.**

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Ditsabhara Polda Kepri yang akan dilakukan adalah:

- 1) Melaksanakan pengukuran keberhasilan terhadap program reformasi birokrasi Polri Quick Wins Polri;

2) Melaksanakan

- 2) Melaksanakan sistem pelaporan Quick Wins berbasis teknologi informasi secara online;
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sub Satgas Sabhara dalam Program Quick Wins.

b. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

- Melaksanakan pengukuran keberhasilan kinerja tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada tingkat Polda Kepri di Direktorat Sabhara Polda Kepri.

V. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Ditsabhara Polda Kepri

1. Program dan Kegiatan

Program Satker Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau pada T.A. 2018 melaksanakan 2 (dua) program yaitu sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, dengan kegiatan :
 - 1) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras :
 - a) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - (1) Perawatan kendaraan khusus;
 - (2) Perawatan kendaraan bermotor Roda 4/6/10;
 - (3) Perawatan kendaraan Roda 2;
 - (4) Perbaikan peralatan kantor;
 - (5) Perbaikan peralatan fungsional;
 - (6) Pengadaan BMP.
- b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat :

a) Pembayaran

- a) Pembayaran gaji dan tunjangan;
 - b) Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan subkomponen Pengadaan peralatan/perengkapan kantor;
 - c) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan, berupa :
 - (1) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan pns
 - (2) Peningkatan kemampuan personel satker
 - (3) Dukungan operasional satker
 - (4) ULP non organik/ jaga fungsi
 - (5) Pengendalian massa.
- 2) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara, berupa :
- a) Pelayanan kesehatan dan makan satwa
 - b) Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli (PNBP)
 - c) Quick wins

2. Usulan Pagu Indikatif Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau

Anggaran Pagu Indikatif Ditsabhara Polda Kepri T.A. 2018 sebesar Rp. 16.676.144.000,- dengan rincian komposisi anggaran sebagai berikut:

a. Rincian Usulan Pagu Indikatif Polda Kepri T.A. 2018 per Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai Rp. 12.551.796.000,-;
- 2) Belanja Barang Rp. 4.124.348.000,-;
- 3) Belanja Modal Rp. 0,-.

b. Rincian Usulan Pagu Indikatif T.A. 2018 per sumber anggaran sebagai berikut:

- 1) Rupiah Murni : Rp. 16.106.144.000,-
- 2) PNBP : Rp. 570.000.000,-

c. Rincian

c. Rincian Usulan Pagu Indikatif T.A. 2018 per Program sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Rp. 1.506.179.000,-;
- 2) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.
15.169.965.000,-;

VI. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Direktorat Sabhara Polda Kepulauan Riau T.A. 2018 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja Polda Kepulauan Riau dan penetapan pagu indikatif T.A 2018.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : NOVEMBER 2017
DIREKTUR SABHARA POLDA KEPULAUAN RIAU

Drs. ANZARI MALATUA SINAGA, MM
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62090826

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KEPULAUAN RIAU
 DIREKTORAT SABHARA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Unit Kerja/Satker : DITSABHARA POLDA KEPRI
 Tahun Anggaran : 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terbangunnya Postur Polda Kepri yang efektif, professional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek system dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana | a. Persentase Penambahan Personel Ditsabhara Polda Kepri b. Persentase Peningkatan Kemampuan Personel Satker Ditsabhara Polda Kepri selama 1 (satu) | 5% 51 Giat |
| 2 | Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polda Kepulauan Riau | Persentase ketepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) / quick respon | 95% |
| 3 | Terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hokum Polda Kepri | Jumlah layanan fungsi Sabhara : 1. Penjagaan 2. Pengawalan 3. Patroli 4. Pengaturan | 365 Giat 5 Giat 500 Giat 500 Giat |

Batam, Januari 2018
 Pihak Pertama
 DIRSABHARA POLDA KEPRI


Drs. ANZARI MALATUA SINAGA, M.M.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62090826

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 DITSABHARA POLDA KEPRI



BATAM, JANUARI 2018